**THE CONTRIBUTION AND EFFECTIVENESS OF CRIMINAL LAW IN THE STRATEGY TO PREVENT THE SPREAD OF DRUGS AMONG SCHOOL CHILDREN: AN ANALYSIS OF POLICY AND ITS IMPLEMENTATION IN A SOCIO-EDUCATIONAL CONTEXT**

KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS HUKUM PIDANA DALAM STRATEGI PENCEGAHAN PENYEBARAN NARKOBA DI KALANGAN ANAK SEKOLAH: SEBUAH ANALISIS TENTANG KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASINYA DALAM KONTEKS SOSIAL-EDUKASI.

**IKHWAN ALAMSYAH**

| ***Abstract*** |
| --- |

*The increasing abuse of drugs among school children, exacerbated by technological advancements and deficiencies in the law enforcement system, is the focus of this study. The objective of this research is to analyze the contribution and effectiveness of criminal law in the strategy for preventing the spread of drugs among school children in Indonesia. This study employs an in-depth qualitative method to collect and analyze data, primarily focusing on relevant legal cases and prevention strategies. The findings reveal that although criminal law plays a crucial role in prevention, there are still shortcomings in implementation and consistency of punishment. The study also highlights the importance of a holistic and multidisciplinary approach involving families, communities, schools, and law enforcement officers to enhance the effectiveness of prevention strategies.*

***Keywords:*** *Criminal Law, Drug Prevention, School Children*

| **Abstrak** |
| --- |

Meningkatnya penyalahgunaan narkoba di kalangan anak sekolah, yang diperparah oleh perkembangan teknologi dan kekurangan dalam sistem penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi dan efektivitas hukum pidana dalam strategi pencegahan penyebaran narkoba di kalangan anak sekolah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif mendalam untuk mengumpulkan dan menganalisis data, fokus utamanya adalah pada kasus-kasus hukum yang relevan dan strategi pencegahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum pidana memegang peran penting dalam pencegahan, masih terdapat kekurangan dalam implementasi dan konsistensi hukuman. Penelitian ini juga menekankan pentingnya pendekatan holistik dan multidisipliner yang melibatkan keluarga, masyarakat, sekolah, dan petugas penegak hukum untuk meningkatkan efektivitas strategi pencegahan.

**Kata Kunci:** Hukum Pidana, Pencegahan Narkoba, Anak Sekolah

1. **PENDAHULUAN**

Di era globalisasi saat ini, penyebaran narkoba telah menjadi salah satu tantangan serius yang dihadapi masyarakat, khususnya di kalangan anak sekolah. Penyalahgunaan narkoba di usia muda tidak hanya berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental, tetapi juga berpotensi menghambat perkembangan sosial dan edukasi anak (Fahliansyah, 2020). Penyalahgunaan narkoba terjadi ketika obat-obatan atau zat berbahaya digunakan bukan untuk keperluan medis atau penelitian, dan dilakukan tanpa mengikuti dosis atau aturan yang tepat. Bahkan ketika digunakan dalam dosis yang direkomendasikan dalam praktik medis, penggunaan narkoba yang berkelanjutan dapat menyebabkan ketergantungan, dependensi, adiksi, atau kecanduan (Priambada, 2013).

Indonesia, yang berdiri sebagai negara hukum, saat ini tengah menghadapi tantangan besar dalam menanggulangi masalah penyalahgunaan narkotika, sebuah masalah yang telah meluas ke berbagai lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang paling rentan: anak-anak di bawah umur. Situasi ini semakin diperburuk oleh perkembangan teknologi yang canggih, yang tidak hanya memudahkan akses ke berbagai jenis informasi tetapi juga memfasilitasi penyebaran narkotika lebih luas lagi. Fenomena ini semakin kompleks dengan terlibatnya Aparatur Penegak Hukum (APH) dalam kasus-kasus narkotika, menciptakan kebutuhan mendesak akan reformasi yang komprehensif dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, sebagaimana dijelaskan oleh Khalaf dan Senjaya (2023).

Ditambah lagi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak-anak di usia yang sangat rentan ini seringkali ditemukan berada di garis depan masalah narkotika, baik sebagai korban maupun pelaku. Keterlibatan mereka dalam kasus narkotika tidak hanya terbatas pada peran sebagai pengguna, tetapi juga sebagai pengedar, sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, seperti kondisi lingkungan keluarga dan pengaruh masyarakat sekitar. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana terhadap anak-anak dalam kasus narkotika membutuhkan pendekatan yang sangat sensitif dan bijaksana, mengingat posisi mereka yang unik sebagai pelaku yang juga korban dalam situasi ini.

Situasi ini menuntut penanganan yang tidak hanya fokus pada aspek hukuman, tetapi juga pada rehabilitasi dan pendidikan sebagai upaya pencegahan. Perlu adanya upaya terkoordinasi antara berbagai instansi pemerintah, lembaga pendidikan, dan keluarga untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan anak-anak. Program-program pendidikan tentang bahaya narkotika, upaya pemberdayaan komunitas, dan peningkatan keterlibatan keluarga dalam pengawasan aktivitas anak-anak merupakan beberapa langkah penting yang harus diintegrasikan dalam strategi pencegahan narkotika di Indonesia.

Saat ini, upaya-upaya yang dilakukan oleh Aparatur Penegak Hukum (APH) dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih menunjukkan beberapa keterbatasan, terutama dalam hal pencapaian hasil yang optimal. Salah satu isu utama yang dihadapi adalah kurangnya transparansi dan efektivitas dalam proses penegakan hukum. Hal ini menciptakan hambatan dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus-kasus narkotika, terutama di kalangan anak sekolah, yang merupakan salah satu kelompok paling rentan.

Dalam rangka mengatasi masalah ini, diperlukan kolaborasi yang lebih luas dan terpadu melibatkan berbagai pihak, tidak hanya APH, tetapi juga keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dan pemerintah. Kerja sama ini penting untuk menciptakan sebuah lingkungan yang kondusif bagi pencegahan dan penanganan masalah narkotika, dengan fokus khusus pada kalangan anak sekolah. Ini mencakup pengembangan program edukasi yang efektif, kegiatan sosialisasi yang lebih intensif, serta peningkatan kesadaran dan keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam upaya-upaya pencegahan.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam tentang kontribusi dan efektivitas hukum pidana dalam strategi pencegahan penyebaran narkoba di kalangan anak sekolah. Hal ini meliputi evaluasi kebijakan yang ada, serta penelaahan terhadap implementasi hukum pidana dalam konteks sosial dan edukasi. Dengan melakukan analisis ini, diharapkan dapat ditemukan area-area yang memerlukan perbaikan, serta peluang-peluang baru untuk meningkatkan efektivitas strategi pencegahan dan penanggulangan narkotika.

Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi cara-cara untuk meningkatkan kerjasama antar berbagai pihak terkait, termasuk membangun mekanisme koordinasi yang lebih efektif antara APH, lembaga pendidikan, keluarga, dan komunitas. Tujuannya adalah untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat diaplikasikan untuk memperkuat sistem pencegahan dan penanggulangan narkotika di Indonesia, dengan fokus khusus pada anak-anak sekolah. Diharapkan, hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan dan strategi baru dalam menghadapi tantangan penyalahgunaan narkotika di kalangan anak sekolah, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan dan praktik yang lebih efektif di masa depan.

1. **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mendalam untuk menilai efektivitas hukum pidana dalam strategi pencegahan penyebaran narkoba di kalangan anak sekolah di Indonesia. Melalui pendekatan ini, penelitian mengumpulkan dan menganalisis data verbal dan tertulis untuk memberikan tinjauan komprehensif tentang pengaruh hukum pidana terhadap fenomena ini (Robbani, El Adawiyah, 2023). Pendekatan kualitatif memberikan keleluasaan untuk mengeksplorasi secara mendalam tentang dampak sosial dan pendidikan dari hukum pidana dalam konteks ini, seringkali menyingkap aspek-aspek yang tidak terjangkau oleh metode analisis standar.

Fokus utama dari penelitian ini adalah mengkaji kasus-kasus hukum yang relevan dan strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan anak sekolah, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan dan kerangka hukum yang ada. Bahan penelitian mencakup undang-undang terkait, publikasi akademis, literatur yang relevan, serta dokumen-dokumen hukum penting. Dengan analisis deduktif, tujuan dari studi ini adalah untuk memberikan gambaran yang luas dan menyeluruh tentang dampak hukum pidana terhadap strategi pencegahan penyebaran narkoba di kalangan anak sekolah, dengan penekanan pada aspek sosial dan edukatif.

1. **HASIL**

Dalam konteks strategi pencegahan penyebaran narkoba di kalangan anak sekolah, hukum pidana memegang peran yang sangat penting dan berkontribusi signifikan. Hukum pidana ini bertugas mengatur kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah penyebaran narkoba, termasuk kasus-kasus yang terjadi di lingkungan sekolah. Namun, penting juga untuk mempertimbangkan dampak negatif dari hukum pidana, terutama terhadap anak-anak yang menjadi korban penyebaran narkoba. Kekhawatiran ini dapat muncul karena stigma atau labelisasi negatif yang melekat pada mereka, baik sebagai pelaku maupun korban. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk menangani masalah penyebaran narkoba di sekolah dengan menerapkan hukum pidana yang efektif, serta memastikan bahwa implementasi hukum tersebut dilakukan dengan bijak dan tepat (Sanger, 2013).

Untuk menanggulangi penyebaran narkoba di lingkungan sekolah, pemerintah perlu mengambil beberapa langkah strategis. Langkah pertama adalah meningkatkan pentingnya pendidikan dan pengembangan anak-anak. Ini berarti memberikan penekanan pada pendidikan tentang bahaya dan akibat dari penyalahgunaan narkoba, serta mengembangkan program-program yang mendidik mereka tentang cara hidup sehat dan bebas dari pengaruh narkoba. Kedua, penggunaan media pelajaran dan pemodelan yang menarik dapat menjadi cara efektif untuk menyampaikan informasi tentang bahaya narkoba kepada anak-anak. Ini dapat mencakup penggunaan alat peraga, video edukatif, dan kegiatan interaktif yang menarik minat anak-anak sekolah, sehingga mereka lebih mudah memahami dan menyerap informasi yang disampaikan (Yuliana, Parawangi, dan Tahir. 2021)

Selanjutnya, menghadapi masalah penyebaran narkoba dengan hukum pidana yang efektif juga sangat penting. Ini berarti bahwa hukum pidana tidak hanya diterapkan untuk menindak pelaku penyalahgunaan narkoba, tetapi juga sebagai sarana pencegahan. Hal ini dapat melibatkan peningkatan kegiatan patroli di lingkungan sekolah, kerjasama dengan lembaga pendidikan untuk melakukan sosialisasi hukum, serta program-program rehabilitasi bagi pelajar yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Penting juga untuk memastikan bahwa implementasi hukum dilakukan dengan cara yang tidak merugikan atau menstigmatasi anak-anak, terutama bagi mereka yang menjadi korban.

Dalam upaya pencegahan penyebaran narkoba di kalangan anak-anak sekolah, efektivitas hukum pidana dan kebijakan yang diimplementasikan harus benar-benar diperhatikan. Hal ini tidak hanya mencakup penerapan hukum yang tegas, tetapi juga pendekatan yang komprehensif dan multidisipliner yang melibatkan berbagai pihak, termasuk sekolah, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Dengan pendekatan seperti ini, diharapkan tujuan pencegahan dan penanggulangan penyebaran narkoba di kalangan anak-anak sekolah dapat tercapai dengan efektif.

1. **PEMBAHASAN**
2. **Evaluasi Kebijakan Hukum Pidana**

Penelitian menemukan bahwa kebijakan hukum pidana di Indonesia telah memberikan kerangka hukum yang cukup untuk menangani penyebaran narkoba di kalangan anak sekolah. Namun, terdapat kekurangan dalam aspek penerapan dan konsistensi hukuman, yang berdampak pada efektivitasnya. Sebuah penelitian oleh Rahadian (2014), menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana politik di Indonesia telah menjadi fokus penelitian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk mengkaji atau menganalisis data sekunder berupa perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana politik saat ini masih menjadi perhatian utama.

Selain itu, penelitian lain mengenai "Kebijakan Hukum Pidana dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia" menyoroti relatif kecilnya perhatian pada korban tindak pidana kejahatan dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dan menemukan bahwa dalam praktek peradilan pidana di Indonesia, hampir tidak ada hakim yang menjatuhkan putusannya berdasarkan pada hak korban tindak pidana kejahatan (Wahyuni, 2008).

Dari penelitian tersebut, terlihat bahwa meskipun kerangka hukum pidana di Indonesia telah ada, terdapat kekurangan dalam penerapan dan konsistensi hukuman yang mempengaruhi efektivitasnya. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dalam implementasi kebijakan hukum pidana untuk menangani penyebaran narkoba di kalangan anak sekolah.

1. Penerapan Hukum dan Tantangan

Implementasi undang-undang terkait penanganan penyebaran narkoba di kalangan anak sekolah seringkali tidak konsisten di Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan sumber daya, kurangnya pelatihan dan kesadaran di antara petugas penegak hukum, serta tantangan dalam koordinasi antar-lembaga (Kenedi, 2017). Selain itu, distorsi dan kendala dalam proses kebijakan publik dalam perencanaan pembangunan daerah juga dapat mempengaruhi implementasi kebijakan hukum pidana.

Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan hukum pidana dalam menangani penyebaran narkoba di kalangan anak sekolah, perlu adanya perbaikan dalam implementasi kebijakan tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan sumber daya, pelatihan, dan kesadaran di antara petugas penegak hukum, serta meningkatkan koordinasi antar-lembaga. Selain itu, perlu adanya perbaikan dalam proses kebijakan publik dalam perencanaan pembangunan daerah untuk memastikan konsistensi antara perencanaan dengan implementasi kebijakan hukum pidana.

Selain kebijakan hukum pidana, upaya pencegahan penyebaran narkoba di kalangan anak sekolah juga dapat dilakukan melalui peran tokoh masyarakat, pengawasan dari orang tua, dan kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh pihak sekolah secara rutin atau berkelanjutan (Yuliana, Parawangi, dan Tahir. 2021)

1. Peran Keluarga dan Masyarakat

Studi menekankan peran vital keluarga dan masyarakat dalam mendukung upaya hukum pidana. Edukasi dan keterlibatan aktif dari keluarga serta program-program masyarakat yang mendukung pemahaman tentang risiko narkoba terbukti sangat penting (Kenedi, 2017). Tokoh masyarakat diharapkan berperan penting dalam menggerakan perilaku masyarakat dalam memberikan pengaruh positif terhadap kelangsungan program pencegahan penyalahgunaan narkoba. Pengawasan dari orang tua dalam berkembangnya anak juga dianggap penting, karena kesadaran anak terbentuk dari pengawasan dan perhatian orang tua yang telah diberikan. Selain itu, kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh pihak sekolah secara rutin atau berkelanjutan juga menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan.

Dalam konteks kebijakan hukum pidana, perlu adanya perbaikan dalam implementasi kebijakan tersebut dengan meningkatkan sumber daya, pelatihan, dan kesadaran di antara petugas penegak hukum, serta meningkatkan koordinasi antar-lembaga. Selain itu, perlu adanya perbaikan dalam proses kebijakan publik dalam perencanaan pembangunan daerah untuk memastikan konsistensi antara perencanaan dengan implementasi kebijakan hukum pidana. Dengan demikian, pendekatan holistik yang melibatkan keluarga dan masyarakat dalam mendukung upaya hukum pidana merupakan kunci penting dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan anak sekolah.

1. **KESIMPULAN**

Kesimpulan dari penelitian ini menekankan peran penting hukum pidana dalam mengatasi penyebaran narkoba di kalangan anak sekolah. Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum pidana yang kuat, penelitian mengungkap adanya kekurangan dalam penerapan dan konsistensi hukuman yang berdampak pada efektivitasnya. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam implementasi hukum pidana, termasuk peningkatan sumber daya, pelatihan untuk petugas penegak hukum, dan peningkatan koordinasi antar-lembaga.

Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya pendekatan holistik dalam pencegahan penyebaran narkoba di kalangan anak-anak sekolah. Langkah-langkah seperti pendidikan tentang bahaya narkoba, penggunaan media pembelajaran yang menarik, dan program rehabilitasi merupakan strategi efektif. Peran keluarga, masyarakat, dan sekolah sangat penting dalam mendukung upaya hukum pidana. Dengan demikian, pendekatan yang komprehensif dan multidisipliner yang melibatkan berbagai pihak diharapkan dapat meningkatkan efektivitas strategi pencegahan penyebaran narkoba di kalangan anak sekolah.

**DAFTAR PUSTAKA**

Fahliansyah, M. (2020). *Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).

Khalaf, M. B., & Senjaya, O. (2023). Penyalahgunaan Narkotika pada Kalangan Anak di Bawah Umur Ditinjau dari Sosiologi Hukum. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *9*(20), 502-514.

Kenedi, J. (2017). Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia. Edited by Sirajuddin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Priambada, S., & MH, B. S. (2013). Penanggulangan Penyebaran Narkoba di Kalangan Anak. In *Seminar Narkoba 2013*. Surakarta University.

Rahadian, D. (2014). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Politik. *Law Reform*, *9*(2), 139-152.

Robbani, H., & El Adawiyah, S. (2023). Brand Strategy Lembaga Amil Zakat (LAZ) Zakat Sukses. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *1*(7).

Sanger, E. (2013). Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Generasi Muda. *Lex Crimen*, *2*(4).

Yuliana, Y., Parawangi, A., & Tahir, M. (2021). Efektivitas Kinerja Penanganan Tindak Pidana Narkoba Anak Di Bawah Umur Pada Kepolisian Resort Kabupaten Pinrang. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, *2*(5), 1827-1841.